

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Malaka sering dijuluki sebagai gerbang utama menuju kawasan Nusantara. Julukan ini diberikan karena peran strategisnya sebagai jalur perdagangan yang memungkinkan para pedagang asing keluar masuk ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia. Posisi geografis Malaka yang sangat strategis, terletak di persimpangan antara Asia Timur dan Asia Barat, menjadikannya pusat lalu lintas dagang yang penting. Malaka juga merupakan sumber segala macam rempah-rempah. Dengan sumber kekayaannya, tidak mengherankan jika Malaka tumbuh menjadi kerajaan yang memiliki pengaruh besar terhadap wilayah sekitarnya.<sup>1</sup>

Namun, pada tahun 1511 terjadi peristiwa besar yakni penaklukan Portugis atas Malaka, mengakibatkan Aceh yang pada saat itu menjadi pesaing Malaka berkembang pesat menjadi bandar dan pusat perdagangan karena banyaknya pedagang yang mengalihkan kegiatan dagang dari Malaka.<sup>2</sup>

Sementara itu, Sultan Mahmud Syah sebagai Sultan terakhir Malaka, berhasil melarikan diri dari serangan Portugis dan menuju Pulau Bintan bersama keluarganya. Meskipun, ia sempat beberapa kali melakukan perlawanan terhadap Portugis, upaya tersebut mengalami kegagalan akibat

---

<sup>1</sup> Rahayu Permana. "Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia" Jurnal dinus Vol. 1 (2015), hal. 11

<sup>2</sup> Sanusi Ismail, et al "Sejarah Jalur Rempah dan Maritim Aceh Pesisir Timur Utara" (Banda Aceh: Pusaka UIN Ar-Raniry, 2022), hal. 20

keterbatasan pasukan dan persenjataan. Setelah Bintan diserang, Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke Kampar, tempat ia wafat pada tahun 1528. Putranya, Sultan Alauddin Riayat Syah II, mendirikan Kesultanan Johor di tepi sungai Johor sebagai kelanjutan politik dan kultural dari kesultanan Malaka.<sup>3</sup>

Kesultanan Johor yang didirikan Alauddin Riayat Syah II di tepi sungai Johor menjadi penerus langsung dari pemerintahan Malaka.<sup>4</sup> Pemilihan lokasi Kesultanan Johor di tepi sungai yang bermuara langsung ke Selat Malaka memiliki tujuan strategis, yaitu untuk menghidupkan kembali kejayaan perdagangan internasional yang pernah diraih Malaka. Sungai Johor dipandang sebagai jalur perdagangan potensial yang mampu menarik para pedagang dari berbagai kawasan. Dengan demikian, Kesultanan Johor tumbuh menjadi pusat politik dan ekonomi penting di kawasan Selat Malaka.<sup>5</sup>

Namun demikian, Perjalanan Kesultanan Johor tidak berlangsung mulus. Pada tahun 1699, terjadi peristiwa Penting yang menandai berakhirnya kekuasaan keturunan langsung Sultan Malaka di Johor. Ketika Sultan Mahmud Syah II wafat

---

<sup>3</sup> Ellya Roza dan Masbukin. "Kesultanan Siak Antara Johor dan VOC". *Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 16. No. 1 (2020), hal. 21

<sup>4</sup> Salmah Jan Noor Muhammad dan Steven Alezender. *Interaksi Kerajaan Johor dengan Eropah: Suatu Analisis Hikayat Johor dan Tawarikh Almarhum Sultan Abu Bakar*. Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Hal. 27

<sup>5</sup> Johan Wahyudi., *Op. Cit.*, hal. 41

tanpa keturunan, Bendahara Sri Maharaja Abdul Jalil<sup>6</sup> diangkat sebagai Sultan Johor, dengan gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Pengangkatan ini memicu klaim dari seorang tokoh bernama Raja Kecil yang mengaku sebagai anak kandung Sultan Mahmud.<sup>7</sup> Klaim tersebut menimbulkan konflik berskala besar yang berujung pada pembunuhan Sultan Abdul Jalil.<sup>8</sup>

Anak dari Sultan Abdul Jalil, yaitu Raja Sulaiman, kemudian meminta bantuan kepada lima bangsawan Bugis untuk merebut kembali tahta dari tangan Raja Kecil. dengan dukungan militer Bugis, Raja Kecil berhasil dikalahkan dan Sultan Sulaiman naik tahta. Namun, sebagai bentuk balas jasa atas dukungan tersebut, Sultan Sulaiman membuat perjanjian kekuasaan dengan orang-orang Bugis. Sejak saat itu, struktur pemerintahan Kesultanan Johor Riau mengalami perubahan, dengan peran dominan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh Bugis, khususnya dalam jabatan Yang Dipertuan Muda.<sup>9</sup>

Sebagai kelanjutan dari Kesultanan Malaka yang pernah memiliki pengaruh kuat di kawasan Melayu, Johor menempati posisi penting dalam sejarah kawasan tersebut. Periode antara 1699 hingga 1760 merupakan fase krusial dalam

---

<sup>6</sup> Bendahara merupakan jabatan layaknya wazir, mangkubumi atau di masa sekarang disebut Perdana Menteri yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun kewenangan tertinggi tetap berada di tangan sultan

<sup>7</sup> Atmadinata dan Encik Abdul Hajar. "*Telaah Kritis Asal Usul Raja Kecil Dalam Historiografi Tradisional Melayu*". Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.3 No. 2 (2023). hal. 707

<sup>8</sup> Elly Roza dan Masbukin, *Op., Cit.*, hal. 23

<sup>9</sup> A. Samad Ahmad, *Op., Cit.*, hal. 14

perjalanan Kesultanan Johor Riau karena memperlihatkan dinamika kekuasaan yang kompleks. Masa ini diwarnai krisis legitimasi, perebutan kekuasaan antar kelompok elit (Melayu, Bugis, dan pendukung Raja Kecil), serta campur tangan kekuatan asing seperti Belanda dan Inggris menjadikan era ini sebagai babak krusial dalam pembentukan sistem politik baru di kawasan tersebut.

Meskipun sudah ada sejumlah penelitian yang mengkaji Kesultanan Johor Riau, kajian yang secara khusus menyoroti krisis politik pada kurun waktu 1699-1760 dan dampaknya terhadap struktur politik, sosial, dan ekonomi kesultanan masih jarang dilakukan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara komprehensif krisis politik yang terjadi di Kesultanan Johor-Riau pada periode tersebut, dengan menyoroti sebab, proses, dan akibat dari pergolakan politik yang terjadi dengan mengambil judul “Krisis Politik Kesultanan Johor Riau Tahun 1699-1760” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika politik Islam di kawasan Nusantara pada abad ke 17 hingga ke 18.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya batasan permasalahan. Pembatasan masalah ditujukan agar penelitian lebih terfokus baik pada pembahasan permasalahan, tempat penelitian ataupun rentang tahun sehingga dapat memperoleh

informasi yang lebih mendalam dan memadai. Maka, penelitian ini terfokus pada pembahasan mengenai krisis politik di Kesultanan Johor Riau serta bagaimana dampak dari krisis tersebut. Adapun dipilihnya kurun waktu tersebut adalah karena 1699 merupakan tahun berakhirnya kekuasaan keturunan langsung Melayu yakni Sultan Mahmud Syah II di kesultanan Johor dengan ditandai naiknya Bendahara Abdul Jalil yang memicu konflik dengan Raja Kecil. Serta tahun 1760 adalah tahun wafatnya Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah yakni sultan yang memerintah setelah Raja kecil dikalahkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya krisis politik Kesultanan Johor Riau?
- 2) Bagaimana proses terjadinya krisis politik Kesultanan Johor Riau?
- 3) Apa dampak dari terjadinya krisis politik Kesultanan Johor Riau?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui latar belakang terjadinya krisis politik Kesultanan Johor Riau
- 2) Untuk mengetahui roses terjadinya krisis politik Kesultanan Johor Riau

- 3) Untuk mengetahui dampak dari terjadinya krisis politik Kesultanan Johor Riau

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk menyumbangkan data mengenai krisis politik Kesultanan Johor Riau Tahun 1699-1760. Selain itu untuk memberikan khazanah keilmuan islam khususnya dibidang akademis, serta sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai Krisis politik kesultanan Johor Riau tahun 1699-1760.

### 2. Secara Praktis

Bagi peneliti, kajian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini diharapkan memberikan ibrah untuk para pembaca dalam melihat sejarah krisis politik Kesultanan Johor Riau tahun 1699-1760. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan jurusan sejarah peradaban islam sebagai sumber informasi literatur, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sejarah peradaban islam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian mengenai krisis politik Kesultanan Johor Riau tahun 1699-1760. diantaranya:

1. Skripsi berjudul *Konflik Internal Kesultanan Johor-Riau Pada Masa Pemerintahan Sultan Abdurrahman Muazzam Syah I Tahun 1812-1832* yang disusun oleh Aidil Febriansyah, Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, 2019. Dalam Skripsinya tersebut, Aidil berusaha membahas mengenai Konflik Internal Kesultanan Johor Riau pada masa Sultan Abdurrahman Muazzam Syah I serta dampaknya pada bidang politik.

Kaitannya dengan penelitian ini, skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Konflik Politik di Kesultanan Johor. Namun, memiliki perbedaan pada objek kajian yaitu penelitian Aidil berfokus di masa Sultan Abdurrahman Muazzam Syah I yakni tahun 1812-1832, sedangkan penelitian ini berfokus pada masa konflik kesultanan Johor dengan Raja Kecil yakni dimulai sejak sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV memerintah tahun 1699 hingga akhir pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah tahun 1760.

2. Buku berjudul *Persilangan Melayu Bugis Telaah Dinamika Sosial Politik Kerajaan Johor-Pahang-Riau-*

*Lingga* karya Sepuddin, Buku ini berusaha membahas mengenai kedatangan orang Bugis di daerah Melayu pada masa Kesultanan Johor Pahang Riau serta kehadirannya yang memberikan dampak struktur fungsional dan hal sosial seperti perkawinan.

Kaitannya dengan penelitian ini, Buku tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan Buku Saepuddin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh orang Bugis di Kesultanan Johor berikut juga dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Adapun perbedaannya yakni, Buku ini menguraikan pembahasan mengenai pengaruh orang Bugis di tanah melayu dalam bidang sosial politik tanpa melakukan periodisasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai Krisis Politik Kesultanan Johor Riau Tahun 1699-1760 yang berfokus membahas terjadinya krisis politik pada kurun waktu tersebut serta dampaknya bagi kesultanan Johor Riau hingga akhir masa Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah baik itu aspek struktur pemerintahan, sosial, politik, dan ekonomi.

3. Artikel Jurnal berjudul *BUGIS DI KERAJAAN MELAYU:*

*Eksistensi Orang Bugis dalam Pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang* yang disusun oleh Syahrul Rahmat, artikel ini berusaha membahas mengenai dinamika politik dan eksistensi orang Bugis dalam kerajaan melayu pada abad 17 hingga 18.

Kaitannya dengan penelitian ini, Artikel tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan Artikel tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hubungan antara Kesultanan Johor dengan orang-orang Bugis serta dampaknya terhadap struktur politik dan sosial. Adapun perbedaan artikel Syahrul dengan penelitian ini adalah artikel ini banyak memfokuskan eksistensi Bugis dalam pemerintahan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada terjadinya krisis politik kesultanan Johor dan dampaknya bagi pemerintahan Johor Riau, serta aspek sosial, politik, dan ekonominya.

## **G. Ladsan Teori**

Dalam suatu penelitian memerlukan adanya landasan teori untuk menjelaskan bagaimana penggambaran mengenai suatu peristiwa. Teori bertujuan sebagai jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Penelitian ini menggunakan teori pemberontakan dan teori kepemimpinan transaksional sebagai berikut:

### **1. Teori Pemberontakan**

Dalam teori pemberontakan terdapat konsep yang menarik yakni konsep deprivasi relatif atau rasa ketidakadilan yang timbul bukan karena kekurangan mutlak, melainkan karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam konteks politik, deprivasi relatif sering menjadi pemicu utama munculnya tindakan

kolektif seperti protes, pemberontakan atau kekerasan. Ted Gurr dalam bukunya berjudul *Why Men Rebel*, menjelaskan tiga bentuk deprivasi relatif:

- a. Deprivasi menurun (decremental): harapan tetap, tetapi kemampuan menurun
- b. Deprivasi aspiratif (aspirational): kemampuan tetap, tetapi harapan meningkat
- c. Deprivasi progresif (progressive): harapan meningkat, kemampuan menurun

Maka semakin besar intensitas deprivasi yang dirasakan, maka semakin kuat motivasi untuk melakukan kekerasan politik dan semakin besar kemungkinan terjadinya pemberontakan.<sup>10</sup>

Dalam melakukan pemberontakan terdapat insentif selektif atau hal yang akan didapat diantaranya:

- a. Material, yakni manfaat ekonomi langsung seperti uang, barang rampasan, pekerjaan, gaji atau akses terhadap sumber daya
- b. Sosial, manfaat berbasis komunitas seperti penerimaan sosial, rasa memiliki, status dan perlindungan dari kelompok
- c. Tujuan, motivasi berbasis nilai-nilai internal seperti moralitas, identitas, harga diri, atau

---

<sup>10</sup> Kristine Eck. *“Raising Rebels”*. Disertasi, Swedia:Uppsala University, (2010), hal. 12

kepuasan karena melakukan sesuatu yang dianggap benar atau bermakna.<sup>11</sup>

Dalam konteks pemberontakan, etnisitas menjadi faktor penting karena sifatnya yang akriptif (bawaan lahir) maka lebih mudah untuk memobilisasinya. Menurut Eck, identitas etnis lebih mudah dikenali dibandingkan keyakinan ideologis. Selain ciri fisik, penanda seperti nama, bahasa, dan tempat tinggal juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi etnis seseorang, Sifat askriptif etnisitas memberikan sejumlah keuntungan organisasi bagi pemimpin pemberontak. Pertama, mereka dapat menargetkan rekrutmen secara lebih efektif dan mengatasi kendala informasi, serta mengurangi biaya koordinasi karena mereka dapat mengandalkan jaringan etnis yang sudah ada. Selain itu, pemerintah lebih sulit memecah-belah kelompok yang sudah solid secara etnis. Individu yang membelot berisiko mendapatkan pembalasan dari komunitas etnis mereka. etnisitas juga dipandang sebagai bentuk insentif sosial, di mana individu bergabung karena adanya unsur solidaritas dan identifikasi kelompok. Eck mengemukakan *“mobilisasi pemberontak berdasarkan garis etnis berkorelasi dengan tingkat keparahan konflik yang lebih tinggi.”*<sup>12</sup>

Dalam krisis politik Kesultanan Johor Riau tahun 1699–1760, konflik dipicu bukan hanya oleh rasa

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 14

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 22-24

ketidakadilan, tetapi juga oleh harapan akan manfaat material, sosial, dan nilai-nilai tujuan. Melihatnya melalui konsep deprivasi relatif dan insentif selektif membantu menjelaskan secara lebih dalam alasan dan mekanisme di balik munculnya tindakan kolektif dan kekerasan politik.

## **2. Teori Kepemimpinan Transaksional**

Burns mendefinisikan kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang memotivasi bawahan atau pengikut dengan minat-minat pribadinya. Kepemimpinan transaksional juga melibatkan nilai-nilai akan tetapi nilai-nilai itu relevan sebatas proses pertukaran (exchange process), tidak langsung menyentuh substansi perubahan yang dikehendaki. Sedangkan Kudisch mengemukakan kepemimpinan transaksional sebagai berikut:

1. Pertukaran sesuatu yang berharga bagi yang lain antara pemimpin dan bawahannya
2. Intervensi yang dilakukan sebagai proses untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan
3. Reaksi atas tidak tercapainya standar yang ditentukan

Menurut Bernard M. Bass kepemimpinan transaksional merupakan di mana pemimpin menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri dan membantu

karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut.<sup>13</sup>

Teori kepemimpinan transaksional bertumpu pada empat asumsi dasar yaitu: **pertama**, prinsip penghargaan atau ancaman (*reward-punishment system*), prinsip ini beranggapan bahwa orang akan termotivasi oleh hadiah dan hukuman; **kedua**, sistem sosial akan berjalan optimal apabila ada sebuah komando yang jelas; **ketiga**, ketika pengikut telah setuju untuk melakukan suatu tugas, berarti menyerahkan wewenang kepada pemimpin; **keempat**, tugas utama pengikut adalah melakukan instruksi pemimpin.<sup>14</sup>

Teori kepemimpinan transaksional menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat dengan tujuan mendapatkan pertukaran yang sepadan atau saling menguntungkan.<sup>15</sup>

Kepemimpinan transaksional yang menekankan pada pertukaran kepentingan antara pemimpin dan pengikut tercermin dalam tindakan Sultan Sulaiman yang

---

<sup>13</sup> Joko Widodo, “Kepemimpinan Pendidikan Transaksional dan Transformasional di SMK Non Teknik”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 3 No. 1 (2008), hal. 129

<sup>14</sup> Zunidar, “Kepemimpinan Transaksional: Model Kontemporer dalam Memimpin Lembaga Pendidikan Islam”, *Jurnal UIN Ar-Raniry*. Vol. 1 No. 1 (2022), hal. 211

<sup>15</sup> I Gede Bayu Wijaya, et al, “Pengembangan Kepemimpinan di Era Disrupsi”, (Yogyakarta: Nuta media, 2022), hal. 10

memberikan Jabatan strategis kepada Opu-Opu Bugis sebagai balasan atas bantuan militer dalam menggulingkan Raja Kecil. Begitu juga ketika Raja Kecil meminta dukungan rakyat dengan menyebarkan propaganda bahwa ia adalah keturunan Sultan sebelumnya disertai dengan hadiah berupa gulungan kain berkualitas tinggi dan ancaman akan terkena daulat bagi siapapun yang menentangnya.

Dalam landasan teori pemberontakan dan teori kepemimpinan transaksional ini, penulis ingin melihat sejauh mana Krisis Politik Kesultanan Johor Riau Tahun 1699-1760 yakni dari masa kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV hingga Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah serta dampaknya bagi kesultanan Johor Riau.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun tahapan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Penelusuran Sumber (Heuristik)**

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah dan merupakan dasar dari proses rekonstruksi peristiwa sejarah.<sup>16</sup> atau dapat dikatakan sebagai teknik dalam memperoleh sumber-sumber, heuristik kerap kali dikaitkan dengan keterampilan dalam menemukan, menangani dan

---

<sup>16</sup> Aditia Muara Padiatra, *“Ilmu Sejarah, Metode dan Praktik”*. (Gresik: Penerbit JSI Press, 2020), hal. 29

memperinci, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.<sup>17</sup>

Pada langkah awal ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.<sup>18</sup> Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tuhfat al-Nafis* Sejarah Melayu Islam oleh Virginia Matheson Hooker yang diterjemahkan oleh Ahmad Fauzi Basri dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur tahun 1991. Dan Aturan Setia Bugis dan Melayu karya Ahmad Riayat Syah, Alauddin Syah bin Opu, Winstedt dan Walbeehm, F. W. tahun 1849 yang ditransliterasi Jawi ke Rumi oleh Mahamada Al Mahadaya dan diterbitkan secara digital oleh Leiden University Libraries.

Adapun sumber sekunder diperoleh untuk melengkapi informasi terkait tema yang diteliti, sumber sekunder yang digunakan peneliti ialah buku berjudul Jalur-Jalur Pelayaran dan Pengaruh Kedatangan Lima Opu Daeng Bersaudara di Tanah Melayu oleh Lisyawati Nurcahyani dan Asnani, buku Sejarah Johor cetakan kedua oleh Haji Buyong Bin Adil, buku *The Kingdom of Johor 1641-1728* oleh Leonard Y. Andaya. Serta diperoleh dari buku, Jurnal maupun artikel lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Dudung Abdurrahman, “*Metodologi Penelitian Sejarah Islam*”, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 101

<sup>18</sup> Sulasman, “*Metodologi Penelitian sejarah, Teori, Metode, Contoh Aplikasi*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 93

## 2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah melakukan penelusuran sumber, maka diperlukan untuk menguji keabsahan sumber atau dikenal dengan verifikasi atau kritik sumber.<sup>19</sup> Tahapan ini penting untuk menilai apakah sebuah sumber relevan bagi sebuah penelitian sejarah dan diperlukan pemikiran yang kritis dalam melakukannya.<sup>20</sup>

Kritik sumber yang dilakukan dapat berupa kritik eksternal ataupun internal. Kritik eksternal merupakan kemampuan menguji atau menilai keautentikan sumber seperti prasasti, dokumen, ataupun naskah berdasarkan waktu pembuatan, bahan, dan sebagainya. Sedangkan kritik Internal adalah menguji atau menilai keautentikan suatu sumber berdasarkan isi dari suatu sumber itu sendiri.<sup>21</sup>

Dalam tahapan kedua ini penulis melakukan pengujian terhadap kebenaran sumber yang telah didapatkan, berupa data tertulis tentang krisis politik Kesultanan Johor Riau tahun 1699-1760. Terdapat dokumen berupa naskah berjudul *Tuhfat Al-Nafis* dan Aturan Setia Bugis beserta data pendukung lain, baik berupa buku, jurnal atau sumber rujukan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian disusun sebagai sebuah fakta.

## 3. Penafsiran (Interpretasi)

---

<sup>19</sup> Dudung Abdurrahman, *Loc., Cit.*, hal. 101

<sup>20</sup> Aditia Muara Padiatra, *Op., Cit.*, hal. 30

<sup>21</sup> Anwar Sanusi, "*Pengantar ilmu Sejarah*", (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2019), hal. 138

Interpretasi merupakan tahapan ketiga dalam penelitian sejarah, proses penafsiran ini seringkali menimbulkan pandangan secara subjektif karena sumber yang sama sekalipun dapat menghasilkan data yang beragam ketika melewati tahapan ini, dalam tahapan ini seorang sejarawan harus berusaha untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu peristiwa dapat terjadi.<sup>22</sup>

Interpretasi dimaksudkan untuk menghasilkan pengilustrasian suatu peristiwa pada masa lampau oleh sejarawan sesuai dengan sumber yang diperoleh dan telah melewati kritik sumber, maka sejarawan perlu menggunakan imajinasinya. Selain itu, sejarawan tetap diperlukan menggunakan fakta-fakta yang ada agar tetap terjaga keabsahan dan representatif.<sup>23</sup>

Pada tahap ini, penulis akan menafsirkan data-data terkait krisis politik kesultanan Johor Riau tahun 1699-1760, dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teori yang telah disebutkan.

#### 4. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahapan akhir dalam penelitian sejarah, yakni berupa pemaparan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penulisannya harus menggambarkan secara jelas

---

<sup>22</sup> Dudung Abdurrahman, *Op., Cit.*, hal. 111

<sup>23</sup> Aditia Muara Padiatra, *Loc., Cit.*, hal. 30

bagaimana proses penelitian mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan.<sup>24</sup>

Perlu diingat bahwa tulisan sejarah akan dibaca oleh orang lain sehingga perlu memperhatikan struktur dan gaya bahasa penulisan agar pembaca dapat memahami pokok-pokok pemikiran yang disajikan.<sup>25</sup>

Dalam tahapan ini peneliti melakukan penulisan sejarah terkait **Krisis Politik Kesultanan Johor Riau Tahun 1699-1760.**

## **I. Sistematika Penulisan**

Dengan merujuk pada metode penulisan di atas, maka agar penulisan ini tidak keluar dari permasalahan dan tersusun secara sistematis dan kronologis, maka pembahasan dalam lima bab yang berkaitan, yaitu:

BAB I ini adalah pendahuluan dengan sub pokok bahasan berupa latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ini akan menjelaskan sejarah berdirinya Kesultanan Johor dengan sub pokok bahasan latar belakang beridinya Kesultanan Johor, para sultan Kesultanan Johor, meninggalnya Sultan Mahmud Syah II dan latar belakang terjadinya krisis politik

---

<sup>24</sup> Dudung Abdurrahman, *Op., Cit.*, hal. 114

<sup>25</sup> Anwar Sanusi, *Op., Cit.*, hal. 138

BAB III Ini akan menjelaskan mengenai proses terjadinya krisis politik di Kesultanan Johor dengan sub pokok bahasan naiknya Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV, perlawanan Raja Kecil, dan naiknya Sultan Sulaiman berkat bantuan orang-orang Bugis.

BAB IV ini akan menjelaskan mengenai dampak dari krisis politik di Kesultanan Johor terhadap struktur pemerintahan, kondisi sosial, politik dan ekonomi dengan sub pokok bahasan munculnya perjanjian sumpah setia, terjadinya perubahan struktur pemerintah, perkawinan campuran antara Bugis dan Melayu, adat istiadat atau aturan masa Sultan Sulaiman dan dominasi Bugis diranah politik dan ekonomi Kesultanan Johor-Riau.

BAB V ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian sebagai bahan acuan untuk memperbaiki penelitian yang dilakukan.

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**